

## **BAB I**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemberdayaan Masyarakat**

##### **2.1.1 Konsep Pemberdayaan**

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-sehari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, Pendidikan, dan Kesehatan (Hamid, 2018). Menurut etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kapasitas. Menurut Edi Suharto bahwa konsep pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata “power” kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini tidak asing lagi di telinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran,

radio, televisi, dan media internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal, umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk menegentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Dalam pendapat lain pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep Pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru Pembangunan, yang bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Alfitri, 2011).

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses Pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

### **2.1.2 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep Pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan Pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model Pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah:

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam "Arah

Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Lembaga ekonomi, Lembaga politik, Lembaga hukum, Lembaga keagamaan, Lembaga adat dan Lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.

2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegaskan “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan Prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran masyarakat”.
3. Mencermati kedua rumusan kebijakan pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah”.
4. Dalam UU Nomor 25 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan Lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan swadaya masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik.
5. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, badan pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandiria masyarakat.
- b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

## **2.2 Kemiskinan**

### **2.2.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar Pendidikan (Nugroho).

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan

salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negative dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

### **2.2.2 Definisi Kemiskinan Secara Umum**

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relative untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap

definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi Kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Mengingat Peraturan No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah keadaan keuangan seseorang atau suatu kelompok dimana hak-hak esensialnya tidak terpenuhi untuk menunjang dan membina kehidupan yang mulia. Kebutuhan-kebutuhan mendasar yang merupakan hak individu atau kelompok mencakup kebutuhan akan pangan, kesejahteraan, pelatihan, penginapan, air bersih, tanah, aset-aset normal, iklim, memiliki rasa aman yang kuat dari perlakuan atau bahaya kebiadaban, dan untuk mengambil tindakan. bagian dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Menurut Laporan Sektor Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan pada tahun 2004 dan diterbitkan oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), masyarakat yang bekerja namun tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya juga dianggap miskin.

Makna kemelaratan kemudian dikaji dan diperluas dengan mempertimbangkan permasalahan kemiskinan dan unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Arti kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers merupakan definisi yang saat ini menjadi pertimbangan dalam setiap program

mitigasi kemiskinan di berbagai negara non-industri dan dunia ketiga. Pandangan yang dikomunikasikan dalam pemaknaan Chambers tentang kemiskinan memberi arti bahwa kebutuhan adalah suatu gagasan yang terkoordinasi yang memiliki lima aspek, khususnya:

1. Kebutuhan (Pantas)

Isu kemiskinan, seperti dalam pandangan pertama, adalah kegagalan pembayaran untuk mengatasi permasalahan mendasar. Gagasan atau pandangan ini tidak hanya berlaku bagi kelompok yang sudah mempunyai gaji.

2. Lemah

Secara umum, batasan upah yang rendah akan mempengaruhi kekuatan sosial seseorang atau suatu kelompok, khususnya dalam mendapatkan keadilan atau hak-hak istimewa yang setara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi umat manusia.

3. Kelemahan dalam menghadapi keadaan krisis (situasi yang sangat sensitif)

Seseorang atau kelompok yang disebut miskin tidak mempunyai atau dapat menghadapi keadaan-keadaan yang mengejutkan dimana keadaan sekarang ini memerlukan porsi gaji untuk menentukannya. Misalnya, kondisi lemah seperti bencana, penyakit yang memerlukan biaya klinis yang umumnya mahal, dan kondisi krisis lainnya yang memerlukan batasan gaji yang memadai. Kondisi kemiskinan dianggap tidak mampu mengelola apa yang terjadi.



4. Ketergantungan Seseorang atau sekelompok orang yang dianggap miskin sangat bergantung pada pihak lain karena keterbatasan kemampuan pendapatan atau kekuasaan sosialnya. Mereka tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk membuat pengaturan atau menyelesaikan masalah, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan gaji baru. Bantuan dari berbagai pihak diharapkan dapat mengatasi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan jenis pendapatan.

#### 5. Keterasingan (Disengagement)

Unsur jarak seperti yang diharapkan Chambers adalah faktor luas yang membuat seseorang atau suatu kelompok menjadi miskin. Biasanya, individu yang disebut miskin berada di daerah yang jauh dari fokus pembangunan moneter. Hal ini karena sebagian besar lembaga bantuan pemerintah lebih banyak berkumpul di pusat-pusat pembangunan ekonomi seperti wilayah metropolitan atau perkotaan besar. Masyarakat yang tinggal di daerah jauh atau sulit dijangkau oleh kantor bantuan pemerintah mempunyai ekspektasi yang cukup rendah terhadap kenyamanan sehari-hari, sehingga kondisi inilah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

### **2.2.3 Skema Terbentuknya Perangkat Kemiskinan**

Rencana penataan kemelaratan yang bergantung pada gagasan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan makna bahwa kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara non-industri dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut hancur. Seringkali, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, layanan kesehatan, perumahan

atau tempat tinggal, dan pendidikan dengan pendapatan rendah. Batas upah rendah juga diartikan sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan mengkonsumsi.

Umumnya pembatasan atau batas gaji yang rendah menyebabkan daya beli seseorang atau suatu kelompok, khususnya untuk mengatasi permasalahan mendasar, menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Pemanfaatan ini pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi pedoman gizi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kapasitas untuk melaksanakan prinsip-prinsip bantuan pemerintah menjadi rendah, misalnya:

1. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga sangat rentan terhadap resiko penyakit menular.
2. Kesehatan relative kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relative terbatas sehingga sangat rentan resiko kematian.
3. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.
4. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan

terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas).

Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran. Berikut penjelasan masing-masing kondisi yang disebabkan oleh tingginya angka kematian atau kesedihan.

#### 1. Rendahnya Minat Sosial

Keadaan kesejahteraan dan kesehatan yang rendah menyebabkan rendahnya keserbagunaan aktual atau modal aktual yang diharapkan untuk kepentingan sosial. Hal ini karena kesejahteraan yang buruk tidak dapat mendukung kerja sama penuh baik dalam lingkungan sosial maupun di tempat kerja. Mayoritas kelompok miskin jarang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

2. Tingkat ketidakhadiran meningkat karena kualitas kesehatan yang buruk, sehingga sulit bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, ketidakhadiran atau pembolosan dalam segala bentuk gerakan meningkat sehingga mereka tidak memiliki kesempatan besar untuk berperan aktif dalam iklim sosial.

#### 3. Tingkat pengetahuan yang rendah

Rezeki yang malang atau kualitas kesejahteraan yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas keilmuan. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pikiran manusia yang diharapkan untuk mengatasi suatu permasalahan memerlukan rezeki yang memuaskan atau optimal. Kesehatan yang buruk

kemungkinan besar menjadi penyebab utama menurunnya kualitas pendidikan.

#### 4. Kelas Rendah

Pada tingkat dasar, keahlian adalah sejenis inovasi. Gerakan ini harus didukung oleh isu medis yang memadai dan tentunya kualitas ilmiah yang memadai. Individu yang mengalami ketidaksehatan atau tidak berdaya terhadap kondisi medis umumnya merasa sulit untuk mengembangkan kemampuannya. Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk membantu pengembangan kreativitas kerja umumnya rendah sehingga mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

#### **2.2.4 Bentuk dan Jenis Kemiskinan**

Unsur-unsur kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis permasalahan dalam kemiskinan dan variabel-variabel yang menyebabkan kondisi yang disebut kemiskinan. Pandangan ilmu sosial mengenai kemiskinan diperluas dengan konsep kemiskinan, yang tidak hanya merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar karena kurangnya pendapatan tetapi juga suatu kondisi yang ditandai dengan ketidakberdayaan akibat buruknya kesehatan dan pendidikan. perwakilan hukum yang tidak memadai, kerentanan terhadap kejahatan, risiko menerima perlakuan politik yang negatif, dan, khususnya, ketidakberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan diri sendiri.

Mengingat keadaan kemiskinan yang dipandang sebagai suatu permasalahan yang kompleks, maka kemiskinan mempunyai 4 jenis kemiskinan, yaitu (Suryawati, 2004):

#### 1. Kemiskinan Absolut

Seseorang atau kelompok dikatakan miskin absolut jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, pelayanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Jumlah rata-rata yang dibelanjakan atau dikonsumsi untuk kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi standar kesejahteraan merupakan garis kemiskinan. Penerapan paling umum dari konsep kemiskinan absolut ini adalah untuk mengidentifikasi atau menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang atau sekelompok orang agar dapat dianggap miskin.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dicirikan sebagai suatu jenis kemelaratan yang terjadi karena dampak dari strategi perbaikan yang diterapkan masyarakat miskin pada semua lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan disparitas upah atau ketidakseimbangan dalam pedoman bantuan pemerintah. Daerah yang masyarakat miskinnya terjangkau oleh program pembangunan seperti ini umumnya dikenal sebagai daerah yang belum matang.

#### 3. Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial merupakan salah satu bentuk kemiskinan yang terjadi karena cara pandang dan kecenderungan seseorang atau masyarakat yang

pada umumnya bermula dari masyarakat atau adat istiadat yang agak enggan menyesuaikan diri dengan pola hidup yang ada saat ini. Kecenderungan seperti ini dapat terlihat lamban, tidak efisien atau tidak pernah hemat, kurang inovatif, dan umumnya bergantung pada pihak lain.

#### 4. Kemiskinan Primer

Kemiskinan primer merupakan jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya akses terhadap aset yang pada umumnya terjadi karena tuntutan sosio-sosial atau sosio-politik yang tidak menjunjung kebebasan orang yang membutuhkan. Kebutuhan semacam ini juga kadang-kadang memiliki unsur-unsur yang merugikan.

Kemiskinan primer adalah jenis kemiskinan yang paling mendapat perhatian dalam bidang sosiologi, khususnya di antara negara-negara pemberi bantuan/kredit, misalnya Bank Dunia, IMF, dan Bank Kemajuan Asia. Selain itu, bentuk kemiskinan struktural dianggap bertanggung jawab atas sebagian besar ketiga bentuk kemiskinan yang disebutkan sebelumnya (Jamasy, 20004: 8-9). Setelah diketahui jenis-jenis kemiskinan, diketahui pula jenis-jenis kemiskinan berdasarkan kecenderungannya. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan watak mereka adalah:

##### 1. Kemiskinan alamiah

adalah kemiskinan yang berkembang akibat kurangnya sumber daya alam, seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta kondisi lahan yang kurang subur. Daerah-daerah yang mempunyai sifat-sifat tersebut pada umumnya merupakan daerah-daerah yang masyarakat miskinnya belum terjangkau oleh

program-program pembangunan dan akibatnya menjadi daerah-daerah yang belum matang.

2. Istilah “kemiskinan buatan” mengacu pada suatu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan di mana individu tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara setara. Kemiskinan seperti ini merupakan akibat buruk dari pelaksanaan gagasan perbaikan (developmentalism) yang banyak dilakukan di negara-negara non-industri.

Cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, misalnya pekerja di sektor industri menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan pekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas sebenarnya sering dikaitkan dengan gagasan kemajuan yang sudah lama diterapkan di negara-negara agraris pada tahun 1970-an (Jarnasy, 2004: 8).

Persoalan kemiskinan dan perbincangan mengenai sebab-sebab kemiskinan saat ini sebenarnya sedang ramai diperbincangkan baik di kalangan ulama maupun di tingkat cita-cita perbaikan (Suryawati, 2004: 123). Salah satu pembahasannya adalah menentukan makna individu atau perkumpulan yang disebut miskin. Pada umumnya, bukti pembeda kebutuhan hanya diselesaikan berdasarkan penanda yang dapat diukur seperti gaji per kapita dan penggunaan/pemanfaatan normal. Sifat-sifat kemelaratan yang masih digunakan untuk menentukan keadaan yang tidak menguntungkan adalah:

1. Tingkat pendidikan yang cukup rendah.
2. Bekerja dalam skala kecil atau disebut juga bekerja di bidang lepas dengan tujuan agar mereka kadang-kadang disebut juga setengah menganggur.
3. berada di kawasan perkotaan atau pedesaan (“daerah kumuh”), jauh dari pusat pertumbuhan daerah, atau keduanya.
4. Memiliki peluang yang cukup rendah untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang memadai, termasuk mendapatkan layanan kesejahteraan dan instruksi untuk memahami pedoman bantuan pemerintah secara umum.

Sebagaimana telah dikemukakan, ciri-ciri kemiskinan di atas tidak serta-merta mempunyai sifat yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan umum, terutama dalam memahami variabel-variabel yang menyebabkan kemelaratan atau susunan kemelaratan. Ciri-ciri kemiskinan di atas hanyalah temuan lapangan yang paling sering diidentifikasi atau diukur.

## **2.3 Perekonomian Masyarakat**

### **2.3.1 Pengertian Perekonomian Masyarakat**

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga. Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian yang lemah



menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya (Zulkarnain).

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya. Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya (Ismail Nawai).

Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu system ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksud adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan system ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau system Pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah system ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

### **2.3.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan system ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangunan ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau memberdayakan. Upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada beberapa Langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

- a. Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.

- b. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- c. Program Pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

Sedangkan menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf Pendidikan dan derajat Kesehatan serta terbentuknya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

### **2.3.3 Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan**

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama Pasal 33 adalah:

- a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD.
- b. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa memujudkan keadilan dalam masyarakat. system ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerja sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat besar.

## **2.4 Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan

selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu diorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat di kelurahan sebagai pusat pembangunan (Aritonang, dalam Rahmat, 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan kelurahan. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintah, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan (Franklin 2015:1326).

Berikut ini merupakan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (Amin Jaya, 2023):

1. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelurahan

Pemberdayaan masyarakat di bidang kelurahan mencakup semua sumber daya yang ada di kelurahan. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program kelurahan, koordinasi dalam pelaksanaan program-program kelurahan, dan peningkatan kualitas kinerja di kelurahan. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja kelurahan dalam membangun serta memajukan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelembagaan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Program ini bertujuan untuk

membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu kelurahan dalam menjalankan roda pembangunan.

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Kelurahan. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industry rumah tangga, pasar, penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Teknologi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah dalam mengikuti zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam

bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

### 4. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini di harapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

## **2.5 Konsep Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.5.1 Pengertian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam untuk memberdayakan terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentang terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan dan keter-belekangan dan dengan demikian keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Hanya saja istilah pemberdayaan ini seringkali tumpang tindih dengan istilah pembangunan meski keduanya sesungguhnya memiliki kaitan erat satu sama lain namun bagaimana pun juga konsep pemberdayaan boleh dikata merupakan terjemahan dari kata “*Empowerment*” sedangkan kata pembangunan merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata “*Development*” (Budiman, Arif 1995).

Meskipun begitu kedua konsep diatas tidak perlu dipertentangkan satu sama lain sebab kedua konsep ini senantiasa di-orientasikan pada suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik dalam semua bidang kehidupan masyarakat (Rappaport, 1984) misalnya mengartikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang mana individu, organisasi dan masyarakat mampu memenuhi kebetuhan hidupnya. Sementara itu (Osmani, 2000) mendefenisikan pemberdayaan sebagai suatu kondisi dimana orang yang tidak berdaya menciptakan suatu situasi demikian rupa sehingga mereka mampu menyampaikan keinginannya dan sekaligus mereka merasa dilibatkan di dalam



kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Adapun menurut Word Bank (2011) lebih mengartikan kegiatan pemberdayaan sebagai usaha untuk memberi kesempatan serta kemampuan pada kelompok masyarakat yang dalam hal ini keluarga miskin untuk mampu dan berani bersuara dalam menyampaikan gagasan dan pendapat mereka serta memiliki keberanian untuk memilih suatu baik itu dalam bentuk metode, produk, tindakan maupun konsep yang dipandang terbaik tidak hanya pada keluarga dan pribadinya tapi juga bagi masyarakat.

### **2.5.2 Tujuan Suatu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Dimaksudkan agar supaya individu, kelompok dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan dan segala bentuk ketebelakangan. Dengan demikian kelompok yang tidak berdaya ini bisa mandiri dan tidak senantiasa tergantung pada individu serta kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa hal yang harus dilakukakn diantaranya perlunya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efisien, efektif, akuntabel serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Pasalnya, perilaku dan budaya seperti ini

memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong dalam serta mempercepat proses perubahan dalam masyarakat sehingga terbangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat.

Sekalipun demikian, upaya untuk mencapai sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat ini rupanya tidaklah semudah sebagaimana yang diperkirakan oleh kebanyakan orang buktinya, fakta lapangan menunjukkan apabila ternyata muncul pula berbagai bentuk hambatan yang dampaknya berakibat pada lambatnya pencapaian sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita sebut saja umpamanya maraknya kasus kejahatan tindak pidana korupsi terhadap anggaran yang telah disediakan sedemikian rupa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Belum lagi munculnya ketidak-setaraan serta perlakuan yang terkesan diskriminatif diantara semua komponen masyarakat, sulitnya memperoleh rasa keadilan terutama bagi orang pinggiran, kinerja birokrasi yang tidak hanya dinilai tidak efektif, berbelit-belit, mengurus banyak dana, pelayanan public yang tidak profesional tapi juga kerap kali birokrasi yang sepatutnya memainkan peran utamanya sebagai organisasi pelayanan public justru malah hanya lebih mengutamakan pada pelayanan kepentingan kelompok tertentu khususnya bagi mereka yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat (Chambers, Robert 1987).

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Upaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ini secara optimal pastilah memerlukan proses yang cukup lama selain harus didukung pula oleh sejumlah faktor lain yang didalamnya mencakup dana yang cukup, tenaga fasilitator / pendamping / agen

pembaharu yang professional dan terampil dalam bidangnya, motivasi yang kuat dari kalangan kelompok yang tidak berdaya, adanya kerja sama yang sinergis, solid dan baik diantara semua elemen masyarakat terutama yang memberi kontribusi bagi lancarnya kegiatan pemberdayaan masyarakat serta ditunjang pula oleh sarana yang memadai dalam mendukung semua aktivitas yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat (Clements P, Kevin. 1997).

Disamping itu, patut pula dipahami kalau kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga memiliki ketekaitan erat dengan masalah pembangunan masyarakat (Community Evelopment). Bahkan sering kali kedua istilah ini digunakan secara tumpang tindih antara satu dengan yang lain apabila seseorang berbicara tentang pembangunan masyarakat. Walaupun demikian ada pendapat seperti dikemukakan oleh Giaci (2001) yang menganggap kalau pembangunan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang memiliki pusat perhatian pada upaya untuk membantu masyarakat diberbagai lapisan agar supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala sarana dan fasilitas yang ada baik itu dalam bertindak, merencanakan, mengelolah serta mengembangkan lingkungan fisiknya sehingga kesejahteraan sosialnya dapat tercapai. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat hanya dapat dilakukan kalau didukung oleh sumber daya manusia yang cakap, terampil, inovatif, kreatif memiliki etos kerja yang tinggi, bersikap terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan serta mandiri dalam merespon setiap masalah yang ada yang mana perilaku seperti ini sangat mendorong terjadinya perubahan masyarakat kearah yang lebih maju, berkembang dan modern (Budiman, Arif).

## **2.6 Konsep Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)**

### **2.6.1 Program dan Pengertian Dana Pemberdayaan Masyarakat (PEM)**

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi”. Sedangkan menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat memujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Ardiansyah, Saleh. 2007).

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

#### **1. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

(Dalam Keputusan Walikota Kupang No. 1/Kep/HK/2014 tentang Perubahan atas keputusan Walikota Kupang No. 15A/Kep/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang) Dana PEM adalah dana yang di alokasikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Kupang yang bersumber dari APBD Kota Kupang dalam bentuk hibah kepada LPM dan disalurkan kepada masyarakat untuk

mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas LPM yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2013, program PEM bertujuan untuk menyediakan bantuan modal untuk menunjang pengembangan ekonomi produktif masyarakat, meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pertumbuhan wirausaha yang produktif. Program dana PEM ini yaitu penyaluran dana ekonomi bergulir dalam bentuk pemberian pinjaman jangka pendek tanpa bunga kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro. Dana ekonomi bergulir ini diharapkan membantu masyarakat dalam meningkatkan kinerja usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat. Sasaran dari pengelolaan dana PEM ini adalah usaha ekonomi produktif berskala mikro yang dikelola Bersama atau perorangan, dengan jenis usaha adalah pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian dan perdagangan serta jenis-jenis usaha produktif lainnya.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam konteks program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah masyarakat dana pengelola Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di lapangan. Keberadaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) juga merujuk pada fungsi fasilitator / pendamping selaku motor penggerak secara teknis

dari program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ditingkat lapangan.

### 3. Lingkungan Tempat Usaha

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian dengan maksud untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan tujuan penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat berskala kecil.

#### **2.6.2 Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Penerapan kebijakan pasti tidak lepas dari dampak yang diakibatkan dari penerapan kebijakan tersebut. Dampak (*impact*) merupakan akibat lebih jauh dari pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

##### 1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pendapatan dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah keseluruhan yang di dapatkan oleh penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai pelaku usaha di Kelurahan Penkase Kota Kupang dari hasil pendapatan usaha yang semakin meningkat. Permasalahan kemiskina yang sering dijumpai dan dialami masyarakat di Kelurahan Penkase Kota Kupang dikarenakan permasalahan modal usaha dan penghasilan yang cenderung pas-pasan. Sebelum adanya bantuan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di

Kelurahan Penkase Kota Kupang, masyarakat melakukan pinjaman ke koperasi harian yang memberi bunga cukup tinggi. Keberhasilan Pemerintah dalam memberikan kebijakan Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Penkase Kota Kupang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, salah satunya peningkatan pendapatan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan modal mengembangkan usahanya.

## 2. Peningkatan Produktivitas Usaha Masyarakat

Peningkatan produktivitas usaha di Kelurahan Penkase sebelum adanya kebijakan pemerintah tentang bantuan dana PEM, Produktivitas masyarakat di kelurahan tersebut belum berkembang yang mana produktivitasnya dari usaha yang dimiliki masyarakat tidak bervariasi.

Dengan adanya program bantuan pemerintah tentang dana PEM yang dilaksanakan pada tahun 2013 hingga sekarang, produktivitas usaha masyarakat mengalami peningkatan yang mana awalnya masyarakat hanya memiliki satu usaha saja dan setelah adanya program dan PEM, masyarakat telah memiliki produktivitas usaha lainnya.

## 3. Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Dana PEM merupakan bantuan modal usaha tanpa bunga pinjaman, oleh karena itu masyarakat harus dapat mengelola dana bantuan tersebut dengan baik sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri tanpa bergantung pada bantuan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Penkase dibuthkannya peran pendamping atau fasilitator yang akan mempercepat proses pemberdayaan sehingga bernilai tinggi, serta proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberhasilan dalam usaha yang dimiliki.

#### 4. Pengguliran Dana

(Dalam Peraturan Menteri Keuangan 218/PMK.05/2009 pasal 1 ayat 1 Peubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga) Pemberian bantuan dana PEM dalam 2 tahap yaitu penyaluran dan pengguliran. Penyaluran dilaksanakan setiap 2(dua) tahun sekali yang merupakan dana hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini bantuan yang diberikan kepada penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat telah di setor kembali dan mencapai 25% dapat dilakukan pengguliran. Masyarakat penerima dana PEM yang sudah melunasi tepat waktu atau dalam jangka waktuu diberikan kesempatan mendapatkan pengguliran dana.



## 5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Penkase yaitu Pemerintah melakukan pendekatan Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilakukan dengan pendekatan Tribina yang bersifat komplementer dan simultan yakni bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut Pemerintah bermaksud agar masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa bantuan Pemerintah melalui program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini sangat penting karena dapat mengembangkan usahanya jika dikelola dengan baik.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Bunga Delva Putri (2020)	Peran Lembaga Pemberdayaan (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM telah berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam Pembangunan desa. Sebagai fasilitator keterlibatan LPM lebih mengarah pada keikutsertaan dalam setiap pertemuan untuk membahas perencanaan Pembangunan. Sebagai mediator LPM mensosialisasikan informasi Pembangunan dengan metode penyampaian dari mulut ke mulut. Sebagai motivator LPM belum mampu mempengaruhi dan meningkatkan semangat gotong royong Masyarakat secara persuasive. Sebagai dinamisator LPM mengadakan pertemuan/rapat untuk menggerakkan/menimbulkan dinamika Pembangunan.
2.	Susaini (2021)	Peran Lembaga Pemberdayaan	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPM telah berperan sebagai mitra pemerintah dalam

		Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Tangkareng Labuai Kecamatan Bukitraya Pekanbaru (2021)	Kualitatif	meningkatkan perekonomian Masyarakat dengan menjalankan peran sebagai Fasilitator yaitu memfasilitasi dan menampung aspirasi Masyarakat. Mediator yaitu mensosialisasikan usulan rencana program pemberdayaan ekonomi kepada semua elemen Masyarakat. Motivator yaitu memberikan dorongan dan memotivasi terhadap kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Dinamisor yaitu memantau dan mendorong Masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi Masyarakat.
3.	Rosni (2020)	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatra Utara	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatra Utara cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Denai. Karena kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar bagi manusia. Dilihat dari program-program yang dijalankan sudah memenuhi standar kesejahteraan. Dalam bidang Pendidikan ada program Rumah Baca, dalam bidang pemenuhan kebutuhan hidup terdapat beberapa program untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat.
4.	Indriyani (2022)	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu dari indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebaga Fasilitator, mediator, motivator dan dinamisor. Dari analisis data yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan desa belum berjalan dengan maksimal. Untuk itu perlu adanya perhatian yang lebih baik lagi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) agar fungsi fasilitator dalam mensosialisasikan, mengajak dan mengundang Masyarakat untuk berpartisipasi bisa lebih baik lagi, diharapkan juga kepada Masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten

				Bengkalis.
5	Darma Pranata (2018)	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPM sudah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan sasaran, tujuan dan manfaat. Dengan melaksanakan kegiatan Pembangunan jalan Onderlagh, pengembangan Koperasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun dampak dari program yang telah dilaksanakan oleh LPM terhadap Masyarakat, dengan pemberian modal usaha koperasi dan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) sangat membantu di dalam Masyarakat sehingga adanya peningkatan ekonomi dari perkembangan usaha yang dijalankan serta menciptakan rasa sejahtera di Masyarakat.

## 2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam Penelitian ini akan diteliti tentang bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak dan apa faktor pendukung dan penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kelurahan Penakse Oeleta Kecamatan Alak.

Menurut Soeharto (2006:76) Pemberdayaan Masyarakat merupakan Upaya untuk memandirikan Masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan Masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu Masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki Masyarakat sehingga Masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat

harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (widjaja.2003:169).

Menurut Eko (2004:11) Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun perdaban dan kemandirian Masyarakat. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterlampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran Masyarakat.

## **2.9 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan gambaran singkat mengenai hipotesis yang digunakan dan bagaimana melibatkan hipotesis dalam menjawab pertanyaan eksplorasi.

Melihat konsentrasi hipotetis di atas, maka penulis merasa penting untuk memahami gagasan fungsional tersebut sebagai struktur penalaran sehubungan dengan judul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang.”**

Berikut di bawah adalah ini bagan kerangka berpikir:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

